

“Kalau semua bilang ekonomi susah, kenapa yang dituntut selalu rakyat berhemat, bukan sistem berbenah?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Kenapa Ekonomi Kita Terasa Seret"

Pekan ini linimasa dipenuhi keluhan yang nadanya seragam: mencari uang makin susah, perputaran ekonomi terasa seret, daya beli menyusut. Di lapis lain, muncul kabar gelombang pemangkasan pekerja di sejumlah tempat, sindiran tentang beban pajak yang terus diburu, dan dugaan penyelewengan di sektor energi yang memasok listrik ratusan juta orang. Yang menarik bukan masing-masing berita, melainkan pola yang mereka

bentuk: publik tidak sekadar merasa miskin, mereka mulai mempertanyakan ke mana harta bersama mengalir dan siapa yang menanggung ongkos ketika roda ekonomi macet. Pertanyaan ini layak dibedah dengan beberapa lensa, karena jawaban yang terlalu cepat — entah "salahkan sistem" atau "salahkan individu" — sama-sama menyisakan celah.

Lensa pertama, dari ekonomi struktural. Argumen ini bilang: keletihan ekonomi rakyat bukan soal individu malas, melainkan soal struktur — konsentrasi kuasa pasar, monopoli sektor vital, dan kebocoran anggaran yang mengurangi kapasitas negara melayani. Implikasinya, menyuruh rakyat "berhemat dan sabar" adalah memindahkan beban ke pihak yang paling tidak berdaya. Tetapi celah lensa ini: ia bisa menumbuhkan fatalisme. Kalau semua salah sistem, individu merasa tidak punya agensi apa pun, dan menunggu perubahan struktural yang mungkin tak kunjung datang. Pertanyaan yang muncul: apakah kritik struktural yang benar bisa berubah menjadi alibi untuk tidak memperbaiki apa pun yang ada dalam jangkauan tangan?

Lensa kedua, dari etika individual. Sebaliknya, ada yang menekankan integritas personal: ekonomi yang sehat lahir dari jutaan transaksi yang jujur. Ketika pedagang bersumpah palsu, pegawai menyunat hak, dan warga menganggap "semua juga curang," kepercayaan kolektif runtuh — dan tanpa kepercayaan, biaya transaksi melonjak dan roda ekonomi memang seret. Prinsip *qist* dan larangan memakan harta dengan batil (QS. Al-Baqara: 188 mengingatkan tentang hal ini) menopang lensa ini. Tetapi celahnya jelas: menuntut kejujuran individu di dalam sistem yang timpang bisa berarti menyalahkan korban. Orang yang terpaksa berutang riba karena tidak ada akses kredit adil tidak setara salahnya dengan yang merancang sistem itu. Pertanyaannya: sampai di mana tanggung jawab moral individu ketika pilihannya sendiri sudah dipersempit oleh keadaan?

Lensa ketiga, dari sosiologi kepercayaan. Lensa ini melihat ekonomi sebagai jaringan kepercayaan sosial. Ketika berita korupsi dan kecurangan menumpuk, yang rusak bukan hanya anggaran, melainkan *modal sosial* — kesediaan orang untuk saling percaya dan bekerja sama. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan menjadi defensif, menimbun, curiga; dan justru sikap ini memperlambat ekonomi lebih jauh. Implikasinya, memulihkan ekonomi butuh memulihkan kepercayaan, bukan sekadar menambah likuiditas. Celahnya: kepercayaan tidak bisa dipaksakan dari atas; ia tumbuh dari bawah, lambat, dan mudah dipatahkan oleh satu skandal besar. Pertanyaan yang menggantung: bisakah kepercayaan dibangun kembali di tengah arus informasi yang tiap pekan menyodorkan skandal baru?

Lensa keempat, dari teologi amanah. Islam membingkai harta sebagai *istikhlaf* — titipan yang atasnya manusia hanya pengelola, bukan pemilik mutlak. Dalam kerangka ini, baik penyeleweng harta publik maupun pemakan riba melanggar prinsip yang sama: memindahkan yang bukan haknya ke dalam genggamannya. Menariknya, lensa ini menyatukan dua lensa sebelumnya — ia menuntut integritas individu *dan* mengecam ketimpangan struktural, karena keduanya adalah pengkhianatan amanah. Prinsip menegakkan timbangan dengan adil dan tidak menguranginya (QS. Ar-Rahmaan: 9) menjadi tolok ukurnya. Tetapi celah lensa ini juga ada: prinsip normatif yang agung tidak otomatis menjadi kebijakan yang bekerja. Menyebut "ini soal amanah" tanpa mekanisme akuntabilitas konkret berisiko berhenti di khotbah. Pertanyaan terakhir: bagaimana prinsip amanah diterjemahkan menjadi institusi yang bisa dituntut pertanggungjawabannya, bukan sekadar imbauan moral?

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, di kos, di kelas, di organisasi? Beberapa hal konkret. Di himpunan atau BEM, buka pos keuangan secara transparan — publikasikan pemasukan dan pengeluaran tiap kegiatan, sekecil apa pun; ini latihan amanah yang nyata. Di kelas ekonomi atau hukum, ubah keluhan menjadi kajian: bedah satu kasus monopoli atau kebocoran anggaran dengan data terbuka, bukan sekadar mengumpat di linimasa. Di kehidupan pribadi,

audit relasi kita dengan riba — paylater yang menumpuk, pinjaman daring yang menggoda saat akhir bulan — dan cari alternatif seperti menabung kolektif antar-teman kos. Dan ketika menjumpai teman yang terjerat pinjaman daring, tahan reaksi menghakimi; bantu ia memetakan jalan keluar, karena stigma hanya mendorongnya makin dalam.

Pada akhirnya, kelelahan ekonomi pekan ini bukan teka-teki yang punya satu jawaban benar. Yang penting bukan memilih satu lensa dan menutup yang lain, melainkan menyadari bahwa lensa apa pun yang diambil sebagai prioritas — struktur, individu, kepercayaan, atau amanah — selalu menyisakan celah yang harus ditutup oleh lensa lainnya. Mungkin di situlah letak kedewasaan berpikir: bukan pada kepastian jawaban, melainkan pada kejujuran mengakui bahwa persoalan harta selalu berlapis.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukannya ini murni masalah sistem? Kenapa kita repot-repot bahas kejujuran individu yang efeknya kecil? —

A

Sebagian benar; struktur memang menentukan ruang gerak. Tapi "sistem" bukan entitas abstrak di langit — ia tersusun dari keputusan-keputusan individu di setiap simpul. Bendahara yang jujur, pegawai yang tidak menyunat, warga yang menolak curang: mereka adalah sistem dalam bentuk terkecil. Menunggu sistem berubah sambil membiarkan simpul-simpul kecil membusuk adalah kontradiksi.

Q · 02

Kenapa harus Islam yang ngurusin ekonomi modern? Bukannya ini ranah ilmu ekonomi sekuler? —

A

Islam tidak mengklaim menggantikan analisis ekonomi teknis. Yang ia tawarkan adalah kerangka nilai — apa yang adil, apa yang batil, siapa yang berhak. Ilmu ekonomi bisa menjelaskan *bagaimana* pasar bekerja; ia lebih sunyi soal *seharusnya* ke mana surplus mengalir. Di ruang normatif itulah tradisi apa pun, termasuk Islam, punya tempat untuk didengar.

Q · 03

Apa bedanya artikel ini dengan moralisme generik "ayo jujur ayo baik"? —

A

Bedanya pada penolakan menyederhanakan. Moralisme generik berhenti di "jadilah jujur." Artikel ini justru menunjukkan bahwa kejujuran individu punya celah kalau berdiri sendiri, dan struktur punya celah kalau tanpa integritas. Yang ditawarkan bukan slogan, melainkan peta ketegangan antar-lensa yang harus dinavigasi, bukan diselesaikan sekali jadi.

Q · 04

Bukankah mengaitkan agama dengan ekonomi politik justru berbahaya dan bisa dipolitisasi? —

A

Risiko itu nyata dan patut diwaspadai. Tapi alternatifnya — mengusir nilai dari ruang ekonomi — juga bukan netralitas; itu sekadar menyerahkan ruang nilai kepada logika untung semata. Yang berbahaya bukan kehadiran nilai, melainkan klaim monopoli kebenaran. Selama prinsip diuji lewat argumen terbuka, bukan dipaksakan, ia memperkaya diskusi, bukan mengancamnya.

Saya tidak terlalu religius, bahkan jarang ibadah. Masih relevan nggak prinsip-prinsip ini buat saya? —

A

Relevan, karena prinsip seperti keadilan takaran dan larangan merampas hak orang tidak butuh keimanan tertentu untuk masuk akal. Kamu bisa membacanya sebagai etika transaksi yang universal. Kebetulan tradisi Islam merumuskannya dengan tajam empat belas abad lalu; menerima kejernihan rumusannya tidak menuntut kamu menerima seluruh paket teologisnya.